

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Dinas SKPD Kota Surakarta)**



**Disusun Oleh :**

**Irma Novalia**

**B 200 110 287**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:  
**“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**

Yang ditulis oleh:

**IRMA NOVALIA**

**B200110287**

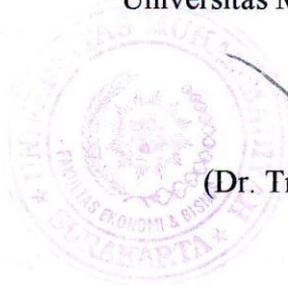
Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, September 2015  
Pembimbing Utama



(Drs. Atwal Arifin, M.Si, Akt.)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E., M.Si.)

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta.

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas SKPD Kota Surakarta dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 80 pegawai. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan kriteria yaitu: Kepala dan staff bagian akuntansi/keuangan dan memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** *Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern.*

### A. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan atau memproduksi barang-barang publik. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Untuk mengelola pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bertanggung jawab. Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pada UU No. 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Pemerintah Kota Surakarta berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan setelah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Surakarta Tahun 2010. Namun opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah kota Surakarta bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan. BPK RI menemukan permasalahan yakni masih rendahnya kualitas informasi laporan keuangan daerah yang disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri yang berhubungan langsung dengan kompetensi sumber daya manusia, belum diterapkannya secara optimal sistem akuntansi keuangan dan masih lemahnya sistem pengendalian internal.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Agency Theory**

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

### **2. Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan setara maksudnya kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Sedangkan hubungan

kemitraan bermakna bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

### **3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan (Mahmudi, 2011:143).

### **4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

### **5. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Nurillah (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

## **6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Menurut Abdul Halim (2008:35) definisi Akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sementara itu, dalam Peraturan menteri dalam negeri No. 64 Tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

## **7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Seperti telah diuraikan dalam pendahuluan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2011:251).

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian ini menggunakan data primer yang digunakan untuk menguji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditinjau dari sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem penendalian

intern. Objek penelitian ini adalah pada Dinas-Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner terhadap bagian keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

## **2. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:148). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Dinas SKPD Kota Surakarta.

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014: 149). Dalam melakukan penarikan sampel, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain pengambilan sampel *purposive sampling* yang merupakan pengumpulan informasi yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang penulis kehendaki.

## **3. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli objek penelitian, dimana data tersebut diperoleh melalui responden dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002:147).

Kuesioner penelitian ini diserahkan kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada Dinas SKPD Kota Surakarta untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner tersebut. Kuesioner yang dibuat dengan menggunakan skala Likert.

## **4. Metode Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis berganda ini dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dan independen secara

menyeluruh baik secara simultan atau secara parsial. Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil terbaik. Dalam penggunaan Analisis regresi berganda, pengujian hipotesis harus menghindari adanya kemungkinan penyimpangan asumsi-asumsi klasik

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,443 lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  2,021 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,018 < \alpha = 0,05$ , oleh karena itu  $H_1$  diterima. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa pegawai dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurillah dan Muid, (2014), Wati, Herawat dan Sinarwati, (2014) dan Yensi, Hasan, dan Anisma (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

##### **b. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,362 lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  2,021 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,022 < \alpha = 0,05$ , oleh karena itu  $H_2$  diterima. Jika sistem akuntansi keuangan daerah sudah diterapkan dengan

baik oleh Dinas–Dinas SKPD Kota Surakarta, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pun akan semakin baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Jadi jelas, bahwa untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurillah dan Muid, (2014), Wati, Herawat dan Sinarwati, (2014), dan Ratifah dan Ridwan (2012) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Sistem pengendalian intern memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.363 lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  2,021 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,001 < \alpha = 0,05$ , oleh karena itu  $H_3$  diterima. Hal ini berarti dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas-Dinas SKPD Kota Surakarta akan semakin membaik.

Sistem pengendalian intern dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian intern maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. Karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan- tindakan kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika sudah ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas maka setiap fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik. Informasi-informasi yang dilaporkan akan lebih

akurat sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurillah dan Muid, (2014), Udiyanti, (2014), dan Ratifah dan Ridwan (2012) yang menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Yensi, Hasan, dan Anisma (2014) yang menyimpulkan SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena masih banyaknya temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- d. Hasil **perhitungan** nilai  $R^2$  dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- $R^2$  sebesar 0,528. Hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern sebesar 52,8% sedangkan sisanya yaitu 47,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} (2,443) > t_{tabel} (2,021)$  atau nilai probabilitas sebesar  $0,018 < \alpha = 0,05$ , yang berarti  $H_1$  diterima.
- b. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} (2,362) > t_{tabel} (2,021)$

atau nilai probabilitas sebesar  $0,022 < \alpha = 0,05$ , yang berarti  $H_2$  diterima.

- c. Sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, nilai  $t_{hitung}$  ( $3,363$ )  $> t_{tabel}$  ( $2,021$ ) atau nilai probabilitas sebesar, yang berarti  $H_3$  diterima.
- d. Secara bersama-sama kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan kontribusi sebesar  $52,8\%$ . Sedangkan sisanya sebesar  $47,2\%$  disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

## **2. Saran**

- a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek pada Kabupaten/Kota yang lain.
- b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan metode survey dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dijadikan sampel.
- c. Untuk peneliti selanjutnya yang serupa dapat dilakukan dengan menambah variabel-variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. UUP STIM
- Indriantoro, Nur. Bambang, Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Mahsun, M., sulistiyowati, F., Purwanugraha, Andre H. 2006. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Edisi Pertama.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurillah, Syifa dan Dul Muid. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Halaman 2.
- Ratifah, Ifa dan M. Ridwan. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Trikonomika Vol. 11, No. 1, Juni 2012.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Udiyanti, Nyoman Ari, Anantawikrama, dan Ari Surya. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014).
- Wati, Desiana, Herawati, dan Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Volume 2 No: 1.